

## Literatur Review: Agenda Kebijakan setelah Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

**Abdurrahman Arif**

STISIPOL Candradimuka, Palembang

Korespondensi penulis: [abdurrahman\\_arif@stisipolcandradimuka.ac.id](mailto:abdurrahman_arif@stisipolcandradimuka.ac.id)

**Arif Rahman Hakim**

STISIPOL Candradimuka, Palembang

Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127

**Abstract.** *Permendikbud No 30 of 2021 is not a point for sexual violence in the higher education environment. Socialization is carried out in limited circles. Information regarding the number of complaints could not be found. This research aims to develop the PPKS agenda after the Permendikbud. Descriptive qualitative method is used to explain the formulation of the problem with the research source being secondary data, namely the study of journal articles and regulations related to this research. Validation of the validity of the data in this study using triangulation. This study uses the theory of setting the policy agenda, namely problem currents, policy currents and political currents. The results of this study are that the target of socialization is not comprehensive both in number and group (problem), the flow of reporting on survivors is available but the facilities are not yet (policy) and the leader determines how a policy is implemented (politics)*

**Keywords:** *Policy Agenda, SLR, PPKS.*

**Abstrak.** Permendikbud No 30 Tahun 2021 tidak menjadi titik bagi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sosialisasi dilakukan pada kalangan terbatas. Informasi terkait jumlah pengaduan tidak dapat ditemukan. Riset ini bertujuan untuk Menyusun agenda PPKS setelah permendikbud. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah dengan sumber penelitian adalah data sekunder yakni kajian terhadap artikel jurnal dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Validasi keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori penyusunan agenda kebijakan yaitu arus masalah, arus kebijakan dan arus politik. Hasil penelitian ini yaitu sasaran sosialisasi tidak menyeluruh baik secara jumlah dan kelompok (masalah), Alur pelaporan penyintas tersedia namun fasilitas belum (kebijakan) dan pemimpin menentukan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan (politik)

**Kata kunci:** Agenda Kebijakan, SLR, PPKS, (secara alfabetis).

## LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 adalah hal yang dilakukan pemerintah terhadap persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan kekerasan seksual sebelumnya terdapat pada peraturan terkait etika bagi civitas akademika. Pengusulan peraturan terpisah dilakukan oleh sejumlah aktor kebijakan seperti mahasiswa, tenaga pendidik, dosen dan pihak ahli. Tujuannya menciptakan ruang nyaman dan aman di ruang publik. Pengesahan permendikbudristek tidak menjadi akhir dari permasalahan kekerasan seksual. Tantangan berikutnya bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi permasalahan selanjutnya. Kebijakan ialah proses dari agenda kebijakan hingga evaluasi kebijakan dan kembali menjadi agenda kebijakan.

Permendikbudristek menjelaskan salah satu pencegahan dilakukan dengan cara penguatan tata Kelola. Tindak lanjut setiap perguruan tinggi dibawah naungan Kemendikbudristek untuk memiliki kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), tim satuan tugas dan penyusunan pedoman PPKS adalah output yang diharapkan dari permendikbudristek, Tapi secara dampak akan berbeda, tidak seluruh perguruan tinggi memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan permendikbudristek tentang PPKS.

Penelitian-penelitian tentang pelaksanaan sosialisasi PPKS di sejumlah perguruan tinggi. Menunjukkan ketertarikan civitas akademika terhadap PPKS. pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tingkatan fakultas melibatkan mahasiswa dengan angka evaluasi kegiatan memiliki rata-rata 86 % (Rohima, S., Saleh, S., Pertiwi, R. 2023). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap kekerasan seksual.

Menurut (Susilowati, 2022) 231 mahasiswa mengisi kuisioner sebanyak 138 mahasiswa cukup tahu dalam memahami kekerasan seksual. Sebanyak 32 sangat tahu terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan dua penelitian diatas terlihat bagaimana pelaksanaan sosialisasi terfokus pada mahasiswa. Menurut Permendikbudristek menjelaskan bahwa sasaran PPKS adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menggunakan pendekatan multiple stream. Ada tiga arus yaitu masalah, kebijakan dan politik, ketiga arus ini memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda. (Kingdon,2014).

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana agenda kebijakan PPKS setelah permendikbudristek nomor 30 tahun 2021?

## **KAJIAN TEORITIS**

Siklus kebijakan dimulai dari penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan. Sebagai langkah pertama dan penting untuk menentukan arah kebijakan. Penyusunan agenda merupakan kesempatan untuk menentukan sebuah masalah sebagai masalah publik atau tidak. Dinyatakan sebagai masalah publik maka menjadi prioritas diantara masalah lainnya. Sehingga layak mendapatkan alokasi sumber daya lebih banyak daripada issue lainnya. Penyusunan agenda memperhatikan isu publik dalam agenda pemerintah. Menurut William N.Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Model agenda setting yang dikembangkan oleh Kingdon yang mengembangkan konsep multiple streams framework. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus. Berawal dari arus masalah merujuk pada melihat masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan pemerintah dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Arus kebijakan merujuk pada solusi yang ditawarkan tidak hanya melalui pemerintah saja melainkan bisa oleh peneliti, komunitas kebijakan, akademisi, pakar kebijakan dalam rangka merespon persoalan. Dalam arus ini berbagai kemungkinan solusi dieksplorasi dan dipersempit. Arus terakhir yang dikemukakan Kingdon dalam konsepnya ini adalah arus politik. Arus politik terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, pergantian pejabat dan anggota parlemen dan kampanye yang bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan (Kingdon, 1984).

## **METODE PENELITIAN**

Sumber penelitian adalah data sekunder melakukan kajian terhadap artikel jurnal dan regulasi yang berkaitan dengan PPKS. Metode kualitatif deskriptif menjelaskan bagaimana situasi PPKS setelah permendikbudristek no 30 tahun 2021. (Azmi & Asmarianti, 2019).

Meningkatkan pemahaman para peneliti terhadap situasi PPKS dari berbagai literatur sebagai alat pembanding dan pengecek adalah tujuan dari tringualisasi data. (Pangestu & Hilman, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil literatur review sebagai berikut :

Penelitian pertama dengan judul Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Kota Palembang pada tahun 2023 oleh Rohmiah dkk. Penelitian ini menemukan beberapa penyebab tidak maksimalnya PPKS antara lain mahasiswa masih tidak memahami konsep kekerasan seksual, belum memiliki kesadaran. Penyintas berpikir ulang untuk melaporkan tindak kekerasan seksual. Sikap tidak tahu menahu ketika ada laporan kekerasan. (Rohima, S., Saleh, S., Pertiwi, R. 2023)

Kedua, penelitian dengan judul Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tahun 2022 dilakukan oleh Susilowati. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 59,7% mahasiswa menyatakan cukup memahami tentang bentuk kekerasan sesksual yang diatur pidananya, dan terdapat 13,9% mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, 23,4% menyatakan kurang tahu, dan 3% menyatakan tidak tahu. Sampel penelitian ini adalah 231 mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan persebaran 3 Fakultas.

Penelitian ketiga dengan judul the new oasis : Implementasi peremndikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada tahun 2022. Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah sebagai peneliti miliki tujuan untuk meninjau bagaimana implementasi permendibud tentang PPKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah perguruan tinggi memiliki kesadaran lebih dalam pelaksanaan peraturan. Tidak hanya membuat regulasi dan pedoman tapi membuat crisis center. Seperti yang dilakukan oleh Uiversitas Gadjah Mada pada tingkatan fakultas

memiliki crisis center yaitu Fisipol Crisis Center diresmikan 3 Febuari 2021. Lain halnya Universitas Negeri Sebelas Maret melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendirikan WE-CARE atau Women Crisis Center UNS. Perguruan tinggi yang belum memiliki crisis center melakukan kalobrasasi dengan HopeHelps adalah sebuah lembaga kelompok advokasi yang berpartner dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia. HopeHelps adalah layanan cepat tanggap yang dimiliki kampus untuk merespon dan menangani adanya tindak kekerasan seksual.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat ini telah memasuki babak baru. Keberadaan permendikbud memberi kemudahan apabila terjadi penanganan kekerasan seksual karena telah memiliki alur laporan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah PPKS memiliki sejumlah permasalahan dari ketiga arus

1. Arus masalah dari kajian literatur disimpulkan bahwa dimensi ini tidak mencapai seluruh aktor yang dimaksud dalam permendikbud. Saat ini hanya mahasiswa yang menjadi sasaran sosialisasi.
2. Arus kebijakan dari kajian literatur disimpulkan bahwa dimensi ini tidak ditemukan laporan terkait angka pelaporan yang diterima setiap unit pelayanan terpadu. Apakah ini bersifat rahasia atau umum ? tentu dengan perlindungan identitas penyitas.
3. Arus politik dari kajian literatur ditemukan bahwa dalam dimensi ditemukan bahwa pemimpin mentukan arah kebijakan. Ketika pemimpin memiliki pemahaman PPKS maka pelaksanaan akan melebihi peraturan yang ada.

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Sosialisasi dilakukan kepada civitas akademika seperti pengajar dan tenaga pengajar.
2. Keterbukaan informasi tentang jumlah pengaduan.
3. Sosialisasi khusus utk pemegang jabatan terkait PPKS.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Azmi, I. F., & Asmarianti. (2019). Studi Kebijakan E-Government di Indonesia: Membangun E-Government Yang Berorientasi Pada Kualitas Pelayanan. *Seminar Nasional Sistem Dan Teknik Informatika (SENSITIF)*, 889–896.
- Pangestu, A. P., & Hilman, Y. A. (2020). Kajian Budaya dan Potensi Kearifan Lokal di Gunung Limo Sebagai Ikon Wisata Budaya Pacitan. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 5(3).
- Rohima, S., Saleh, S., Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1): 49-60. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Simanjuntak, E.G. & Isbah, M.F. (2022). The New Oasis : Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11 (3):537- 555.
- Susilowati, Anggi Yus. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7 (No. 2), 233-247.

### Buku Teks

- Dunn, William N, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..
- Kingdon, J.W., 2014. *Agendas, alternatives, and public policies*, Essex.
- Kingdon, J.W. and Stano, E., 1984. *Agendas, alternatives, and public policies* (Vol. 45, pp. 165-169). Boston: Little, Brown.